



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 5638-5650

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintahan Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Sistem Pengendalian Intern sebagai Variabel Intervening pada Desa di Kecamatan Sungai Selan

Amelia^{1✉}, Rulyanti Susi Wardhani², Vebtasvili³

Universitas Bangka Belitung

Email : amelia0406020@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Desa merupakan suatu wilayah yang dihuni oleh sekelompok warga yang pemerintahan desa dilakukan oleh warga itu sendiri (Raharjo, 2020). Desa yang diselenggarakan oleh aparatur pemerintahan desa membutuhkan dana desa untuk menjalankan pemerintahan desa. Maraknya kasus korupsi ataupun aparatur pemerintahan desa yang menyalahgunakan dana desa menjadi PR bagi pemerintah pusat untuk memperbaiki tatanan pemerintahan desa, kecurangan yang terjadi tentunya merugikan banyak pihak sehingga harus diteliti lebih dalam penyebab kecurangan tersebut terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh kompetensi aparatur pemerintahan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel *intervening*. Pendekatan penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan sampel sebanyak 83 responden. *Purposive sampling* digunakan dalam teknik pengambilan sampel dan menganalisis data menggunakan *Path Coefficient*. Penelitian ini membuktikan bahwa kompetensi aparatur pemerintahan desa mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan *path coefficient* menyatakan sistem pengendalian intern bisa memediasi hubungan kompetensi aparatur pemerintahan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kata Kunci: *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Kompetensi Aparatur Pemerintahan Desa dan Sistem Pengendalian Intern.*

Abstract

A village is an area inhabited by a group of residents where village governance is carried out by the residents themselves (Raharjo, 2020). Villages organized by village government officials require village funds to run village government. The rise in cases of corruption or village government officials misusing village funds has become homework for the central government to improve the village government structure. The fraud that occurs is certainly detrimental to many parties so it must be investigated more deeply into the causes of this fraud. The aim of this research is to obtain empirical evidence about the influence of the competence of village government officials on the accountability of village fund management with the internal control system as an intervening variable. This research approach uses quantitative descriptive analysis with a sample of 83 respondents. Purposive sampling is used in sampling techniques and analyzing data using Path Coefficient. This research proves that the competence of village government officials has an influence on the accountability of village fund management. Based on the path coefficient, it states that the internal control system can mediate the relationship between the competence of village government officials and the accountability of village fund management.

Keywords: *Accountability of Village Fund Management, Competence of Village Government Apparatus and Internal Control System*

PENDAHULUANN

Desa adalah suatu daerah yang ditempati sekelompok warga yang pemerintahan desa dilakukan oleh warga itu sendiri (Raharjo, 2020). Kepala desa dibantu perangkat desa menyelenggarakan desa. Aparatur pemerintahan desa mempunyai tugas dalam mengelola dana desa dan berkewajiban mengelola dana tersebut secara baik dan taat undang-undang mengenai dana desa. Guna mewujudkan *good governance* (tata kelola yang baik), dana desa dikelola secara tertib dan disiplin. *Good governance* memiliki tiga pilar dan salah satunya akuntabilitas. Akuntabilitas menjadi salah satu hal yang wajib dipatuhi dikarenakan aparatur pemerintahan desa diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan atau menanggapi serta memaparkan kinerja dan juga aksi dari kepala desa terhadap pihak-pihak terkait yang mempunyai hak serta wewenang mendapatkan penjelasan ataupun pertanggungjawaban. Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah tanggung jawab dari seorang aparatur pemerintahan desa atas dana desa yang dikeloladengan baik serta taat undang-undang pengelolaan keuangan desa (Ningsih et al., 2020). Banyak faktor yang bisa mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, diantaranya adalah kompetensi aparatur pemerintahan desa dan sistem pengendalian intern.

Suatu kemampuan yang mencakup pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang dipelajari dari berbagai macam proses seperti pendidikan, pelatihan atau pengalaman disebut dengan kompetensi (Indraswari dan Rahayu, 2021). Aparatur pemerintahan desa mempunyai tanggung jawab dalam mengelola dana desa, kemudian diwajibkan untuk melaporkan kegiatan mengelola dana desa dengan membuat laporan keuangan dana desa. Laporan keuangan ini bentuk dari tanggung jawab seorang aparatur pemerintah desa atas dana desa yang telah digunakan.

Penyelenggaraan pemerintahan desa memerlukan suatu sistem pengawasan dalam menjalankan pemerintahan desa agar dapat tercapainya tujuan atau visi misi desa. Suatu proses yang dilakukan dewan direksi, manajemen dan anggota staf lainnya dalam organisasi dan didesain untuk memastikan tercapainya tujuan operasi, pelaporan dan kepatuhan merupakan pengertian pengendalian intern menurut COSO. ada 5 komponen pokok pengendalian intern yang bisa dilakukan secara efektif yaitu *control environment, risk assessment, control activities, communication and information*, serta *monitoring*. Arfiansyah (2020) menyatakan sistem pengendalian intern dapat memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sistem pengendalian intern yang memadai dapat meminimalisir kecurangan yang terjadi serta dapat mendorong aparatur pemerintahan desa untuk tidak melakukan penyalahgunaan dana desa.

Desa diselenggarakan oleh aparatur pemerintahan desa membutuhkan dana untuk menjalankan pemerintahan desa dan memajukan desa tersebut. Berdasarkan data PMK No. 146 Tahun 2023, desa di Kecamatan Sungai Selan menerima anggaran dana desa terbesar se-Kabupaten Bangka Tengah dengan nominal Rp11.356.537.000. Desa yang ber-Kecamatan Sungai Selan mendapatkan dana desa dengan nominal yang besar. Namun, pengelolaan dana desa tidak luput dari berbagai macam masalah, seperti akuntabilitas pengelolaan dana desa yang rendah, dana desa disalahgunakan, rendahnya pembangunan desa dan tidak berjalan dengan baik serta rendahnya kepercayaan masyarakat desa kepada aparatur pemerintahan desa. Maraknya kasus korupsi ataupun aparatur pemerintahan desa yang menyalahgunakan dana desa menjadi PR bagi pemerintah pusat untuk memperbaiki tatanan pemerintahan desa, kecurangan yang terjadi tentunya merugikan banyak pihak sehingga harus diteliti lebih dalam penyebab kecurangan tersebut terjadi.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti memutuskan meneliti terkait masalah yang terjadi dengan judul "Kompetensi Aparatur Pemerintahan Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Sistem Pengendalian Intern sebagai Variabel *Intervening*

pada desa di Kecamatan Sungai Selan”.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Populasi penelitiannya yaitu Pemerintahan Desa se-Kecamatan Sungai Selan sebanyak 12 desa dan teknik pengambilan sampelnya *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut: (1) Perangkat desa mencakup kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, kepala urusan perencanaan, kepala urusan tata usaha dan umum, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi kesejahteraan dan kepala seksi pelayanan. (2) Pendidikan minimal SMA/SLTA sederajat. Sebanyak 83 responden sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

Analisis data dan pengujian menggunakan SEM - PLS. PLS adalah metode analisis data yang dapat digunakan pada semua skala data, tidak memerlukan asumsi yang banyak dan sampel yang digunakan tidak perlu besar. PLS bertujuan untuk membantu peneliti dalam rediksi karena merupakan model perdamakan SEM yang berbasis komponen(Ghozali, 2021).

Outer Model, PLS (*Partial Least Square*) dengan software SmartPLS 4 digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini. Model Pengukuran dapat menspesifikasi hubungan variabel dengan setiap indikatornya. Model pengukuran (*Outer Model*) digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas yang memiliki tiga pengukuran, yaitu konvergent validitas (*convergent validity*), validitas diskriminan (*discriminant validity*), komposit reliabilitas (*composite reliability*). *Inner Model*, merupakan penggambaran bagaimana variabel laten berhubungan dengan variable laten lainnya berdasarkan substansi teori. *Inner Model* terdiri dari Uji R^2 , dan Uji *F-Square*, serta Uji Model Fit.

Path analysis digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini dengan memperhatikan *patch coefficient* dan *P-value* menghasilkan korelasi antar variabel. Kemudian, hasil tersebut dibandingkan dengan hipotesis penelitian. Tingkat signifikansi yang dipakai sebesar 5% atau 0,05. Apabila tingkat signifikansi atau *p-value* kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima dan jika tingkat signifikansi atau *p-value* lebih dari dari 0,05 maka hipotesis tidak dapat diterima atau ditolak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aparatur pemerintahan desa di seluruh desa pada Kecamatan Sungai Selan merupakan sample yang digunakan dalam penelitian ini dengan *purposive sampling* dipakai untuk teknik pengambilan sampel. Sebanyak 96 responden jumlah sample dan

data yang dapat diolah sebanyak 83 responden. Rata-rata responden dalam penelitian ini memiliki jenis kelamin laki-laki dan sebagian besar berumur 30 – 45 tahun, serta rata-rata pendidikan SMA/SLTA sederajat.

Validitas konvergen digunakan untuk menilai suatu indikator berdasarkan hubungan antara variabel dengan indikator tersebut. Suatu kuesioner dikatakan valid dan berkorelasi dengan baik apabila nilainya $> 0,7$. Namun, nilai dari 0,5 – 0,6 sudah memenuhi (Ghozali, 2021).

Tabel 1 Uji validitas Konvergen

Variabel	Indikator	<i>Loading Factor</i>	Keterangan
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	APDD1	0,862	Valid
	APDD2	0,815	Valid
	APDD3	0,788	Valid
	APDD4	0,875	Valid
	APDD5	0,839	Valid
	APDD6	0,859	Valid
	APDD7	0,792	Valid
	APDD8	0,832	Valid
	APDD9	0,801	Valid
	APDD10	0,816	Valid
Sistem Pengendalian Intern	SPI1	0,802	Valid
	SPI2	0,859	Valid
	SPI3	0,741	Valid
	SPI4	0,757	Valid
	SPI5	0,806	Valid
	SPI6	0,876	Valid
	SPI7	0,789	Valid
	SPI8	0,799	Valid
	SPI9	0,772	Valid
	SPI10	0,793	Valid
Kompetensi Aparatur Pemerintahan Desa	KAPD1	0,790	Valid
	KAPD2	0,839	Valid
	KAPD3	0,815	Valid
	KAPD4	0,387	Tidak Valid
	KAPD5	0,831	Valid
	KAPD6	0,872	Valid
	KAPD7	0,814	Valid

KAPD8	0,784	Valid
KAPD9	0,792	Valid
KAPD10	0,770	Valid

Sumber: data diolah oleh peneliti, 2024

Berdasarkan Tabel 1 hasil pengolahan data membuktikan ada beberapa indikator yang nilai loading factor $< 0,5$ yaitu KAPD4 sehingga harus diambil tindakan mengeliminasi indikator tersebut.

Tabel 2 Uji validitas Konvergen Setelah Eliminasi

Variabel	Indikator	<i>Loading Factor</i>	Keterangan
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	APDD1	0,862	Valid
	APDD2	0,814	Valid
	APDD3	0,788	Valid
	APDD4	0,875	Valid
	APDD5	0,839	Valid
	APDD6	0,859	Valid
	APDD7	0,793	Valid
	APDD8	0,833	Valid
	APDD9	0,801	Valid
	APDD10	0,816	Valid
Sistem Pengendalian Intern	SPI1	0,802	Valid
	SPI2	0,859	Valid
	SPI3	0,741	Valid
	SPI4	0,757	Valid
	SPI5	0,806	Valid
	SPI6	0,876	Valid
	SPI7	0,789	Valid
	SPI8	0,798	Valid
	SPI9	0,772	Valid
	SPI10	0,793	Valid
Kompetensi Aparatur Pemerintahan Desa	KAPD1	0,800	Valid
	KAPD2	0,841	Valid
	KAPD3	0,813	Valid
	KAPD5	0,823	Valid
	KAPD6	0,874	Valid
	KAPD7	0,812	Valid
	KAPD8	0,790	Valid

KAPD9	0,802	Valid
KAPD10	0,766	Valid

Sumber: data diolah oleh peneliti, 2024

Berdasarkan Tabel 2 memperlihatkan nilai loading factor > 0,5 diseluruh indikator yang menandakan bahwa data telah valid sesudah dilakukan eliminasi.

Validitas diskriminan (*discriminant validity*) dipakai dalam memastikan suatu konstruk berbeda dari konstruk lainnya secara konseptual dengan menunjukkan perbedaan yang memadai. Validitas diskriminan bisa dilihat menggunakan nilai fornell lacker criterion dengan membandingkan nilai \sqrt{AVE} . Korelasi nilai \sqrt{AVE} variabel harus lebih tinggi dengan variabel latennya itu sendiri daripada korelasi variabel laten lainnya.

Tabel 3 Uji Validitas Diskriminan

	APDD	KAPD	SPI
APDD	0,828		
KAPD	0,811	0,814	
SPI	0,817	0,800	0,800

Sumber: data diolah oleh peneliti, 2024

Tabel 3 membuktikan nilai \sqrt{AVE} Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa terhadap variabel latennya sendiri sebesar 0,828 dan lebih tinggi daripada korelasi variabel laten lainnya. Nilai \sqrt{AVE} Kompetensi Aparatur Pemerintahan Desa terhadap variabel latennya sendiri sebesar 0,814 dan lebih tinggi daripada korelasi variabel laten lainnya. Nilai \sqrt{AVE} Sistem Pengendalian Intern terhadap variabel latennya sendiri sebesar 0,800 dan lebih tinggi daripada korelasi variabel laten lainnya. Hal ini membuktikan seluruh variabel laten berkorelasi lebih tinggi dengan variabel laten itu sendiri daripada variabel laten lainnya sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa validitas diskriminan dinyatakan baik.

Menguji nilai reliabilitas indikator-indikator pada variabel menggunakan komposit reliabilitas (*composite reliability*). Reliabilitas komposit yang dapat dikatakan baik apabila nilai *composite reliability*-nya lebih dari 0,7 (Ghozali, 2021).

Tabel 4 Uji Reliabilitas Komposit

	Conbrach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)
APDD	0,949	0,951	0,956
KAPD	0,936	0,939	0,946
SPI	0,37	0,940	0,947

Sumber: data diolah oleh peneliti, 2024

Berdasarkan Tabel 4 menyatakan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa mempunyai nilai *composite reliability* sebesar 0,951, Kompetensi Aparatur Pemerintahan Desa

mempunyai nilai *composite reliability* sebesar 0,939, dan Sistem Pengendalian Intern mempunyai nilai 0.940. Hal ini menunjukkan nilai *composite reliability* seluruh variabel lebih dari 0,7 yang berarti bahwa *composite reliability*-nya baik.

Mengukur bagaimana variabel bebas mempengaruhi variabel terikat menggunakan Koefisien determinansi (Uji R^2). Nilai R^2 berkisaran 0 hingga 1 ($0 < R^2 < 1$). Variabel dikatakan kuat dalam mempengaruhi apabila memiliki nilai R^2 sebesar 0,67, nilai R^2 sebesar 0,33 dikatakan moderat dan nilai R^2 sebesar 0,19 dikatakan lemah dalam mempengaruhi (Ghozali, 2021).

Tabel 5 Uji R^2

	R-square	Keterangan
APDD	0,736	Kuat
SPI	0,640	Kuat

Sumber: data diolah oleh peneliti, 2024

Tabel 5 mengindikasikan bahwa variabel terikat Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dipengaruhi oleh Kompetensi Aparatur Pemerintahan Desa sebesar 0,736 atau 73,6% dan 26,4% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Variabel bebas Kompetensi Aparatur Pemerintahan Desa dalam mempengaruhi variabel intervening sebesar 0,640 atau 64% dan 36% dipengaruhi oleh variabel lain. Kesimpulannya adalah variabel terikat Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan variabel intervening Sistem Pengendalian Intern kuat dipengaruhi oleh Kompetensi Aparatur Pemerintahan Desa.

Uji *f-square* digunakan untuk menentukan apakah prediktor variabel laten memiliki pengaruh kuat, sedang atau lemah, pada tingkat strukturalnya. *F-square* yang mempunyai nilai 0,35 menunjukkan variabel berpengaruh kuat, nilai 0,15 menunjukkan variabel berpengaruh sedang, nilai sebesar 0,02 menunjukkan variabel berpengaruh lemah (Ghozali, 2021).

Tabel 6 Uji *F-Square*

	APDD	KAPD	SPI
APDD			
KAPD	0,260		1,780
SPI	0,297		

Sumber: data diolah oleh peneliti, 2024

Tabel 6 membuktikan bahwa satu variabel yang memberikan kontribusi kuat terhadap nilai *F-Square* yaitu variabel Kompetensi Aparatur berkontribusi terhadap Sistem Pengendalian Intern dengan nilai 1,780. Dua variabel yang memberikan kontribusi sedang

terhadap nilai *F-Square* yaitu variabel Kompetensi Aparatur Pemerintahan desa berkontribusi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan nilai 0.260 dan Sistem Pengendalian Intern berkontribusi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan nilai 0.297.

Uji model fit digunakan untuk menguji kecocokan model dengan data. Uji model fit melihat nilai SRMR dan nilai NFI. Model dikatakan cocok apabila nilai SRMR < 0.10 dan nilai NFI mendekati 1 (Ghozali, 2021).

Tabel 7 Uji Model Fit

<i>Saturated Model</i>		Kriteria
SRMR	0,083	SRMR < 0,10 dikatakan cocok
NFI	0632	Nilai NFI mendekati 1 semakin baik

Sumber: data diolah oleh peneliti, 2024

Tabel 7 memperlihatkan SRMR bernilai 0,083 lebih rendah dari 0,10 sehingga model dapat dianggap cocok dan nilai NFI sebesar 0,632 yang dapat dikatakan baik.

Path analysis atau analisis jalur dalam penelitian ini digunakan untuk pengujian hipotesis. Pengukuran dalam penelitian ini memperhatikan nilai *p-value* dengan sebesar 5% atau 0,05 tingkat signifikansi dan t-statistik sebesar 1,96. Apabila *p-value* < 0,05 dan t-statistik diatas 1,96 maka hipotesis diterima. Apabila *p-value* > 0,05 dan t-statistik dibawah 1,96 maka hipotesis tidak diterima atau ditolak.

Tabel 8 Uji *Boostrapping* (Pengaruh Langsung)

	<i>Original sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standard Deviation (STDEV)</i>	T- <i>Statistics</i>	<i>P-Value</i>
KAPD -> APDD	0,437	0,435	0,126	3,459	0.001
KAPD -> SPI	0,800	0,804	0,049	16,275	0.000
SPI -> APDD	0,467	0,470	0,114	4,111	0.000

Sumber: data diolah oleh peneliti, 2024

Tabel 8 menguji akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi kompetensi aparatur pemerintahan desa memperlihatkan *original sample* bernilai 0,437 yang berarti menunjukkan arah pengaruh positif. *P-value* bernilai 0,001 yang dimana lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa mempunyai pengaruh yang signifikan, didukung juga dengan t-statistik senilai 3,459 yang dimana lebih tinggi dari *t-value* 1,96, artinya mempunyai pengaruh signifikan. Sehingga dapat diambil kesimpulan akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi positif signifikan oleh kompetensi aparatur pemerintahan desa. Hal ini berarti arti bahwa aparatur pemerintahan desa yang berkompeten maka akan

menghasilkan output yang berkualitas sejalan dengan salah satu pilar good governance yaitu akuntabilitas. Dana desa yang dikelola oleh aparatur desa wajib dilakukan dengan baik dan taat serta tertib perundang-undangan mengenai dana desa. Dana desa yang dikelola memerlukan kompetensi yang baik dari aparatur pemerintahan desa, kompetensi tersebut meliputi keterampilan dan pengetahuan serta sikap kerja yang didapatkan dari berbagai macam proses seperti pendidikan, pelatihan atau pengalaman. Untuk mewujudkan akuntabilitas yang baik dibutuhkan kompetensi yang baik pula dari aparatur pemerintahan desa. Tercapainya kesuksesan dalam mengelola dana desa terdapat faktor dari aparatur pemerintahan desa yang berkompeten. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Maharani dan Susanto (2021) yang menyatakan kompetensi aparatur pemerintahan desa dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Rismawati (2019) yang menyebutkan akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak dipengaruhi kompetensi aparatur pemerintahan desa.

Berdasarkan Tabel 8 untuk menguji sistem pengendalian intern dipengaruhi kompetensi aparatur pemerintahan desa menunjukkan nilai *original sample* sebesar 0,800 yang berarti menunjukkan arah pengaruh positif. *P-value* senilai 0,000 yang dimana lebih rendah dari 0,05, artinya mempunyai pengaruh yang signifikan dan didukung dengan *t-statistik* senilai 16,275 yang dimana lebih besar dari *t-value* 1,96 yang artinya mempunyai pengaruh signifikan. Sehingga dapat diambil kesimpulan sistem pengendalian intern dipengaruhi secara positif signifikan oleh kompetensi aparatur pemerintahan desa. Hal ini mempunyai arti aparatur pemerintahan desa yang berkompeten akan memiliki kemungkinan kecil untuk melakukan kecurangan, sehingga sistem pengendalian intern yang diterapkan meningkat lebih baik. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Maharani dan Susanto (2021) yang menyatakan kompetensi aparatur pemerintahan desa dapat mempengaruhi sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian internal dapat mendorong aparatur pemerintahan desa secara efektif dan juga efisien dalam mengoptimalkan tujuan organisasi. Aparatur pemerintahan desa yang berkompeten akan lebih bisa dipercaya sehingga penerapan pengendalian intern minim akan menimbulkan suatu masalah dan bisa memberikan laporan yang akurat.

Tabel 9 Uji *Bootsrapping* (Pengaruh Tidak Langsung)

	<i>Original sample (O)</i>	T statistics	<i>P-Value</i>	Statistik <i>Upsilon (V)</i>
KAPD -> SPI -> APDD	0,374	3,734	0.000	0.139

Sumber: data diolah oleh peneliti, 2024

Tabel 9 memperlihatkan nilai *original sample* sebesar 0,374 yang berarti menunjukkan arah pengaruh positif. *P-value* senilai 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa mempunyai pengaruh yang signifikan dan didukung dengan *t-statistik* senilai 3,734 yang dimana lebih tinggi dari *t-value* 1,96 yang artinya mempunyai pengaruh signifikan. Meskipun demikian, peran mediasi Sistem Pengendalian Intern masih tergolong pengaruh mediasi moderat dengan nilai *upsilon (v)* sebesar 0,066. Hal ini membuktikan bahwa Sistem Pengendalian Intern dapat memediasi hubungan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Desa dengan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hal ini berarti bahwa aparatur yang berkompeten akan menghasilkan output yang berkualitas seperti akuntabilitas pengelolaan dana desa semakin baik. Akuntabilitas pengelolaan dana desa berkaitan dengan sistem pengendalian intern, yang dimana aparatur pemerintahan desa yang berkompeten akan memiliki kemungkinan kecil untuk melakukan kecurangan berdampak pada sistem pengendalian intern yang diimplementasikan lebih baik berdampak pula pada kualitas akuntabilitas pengelolaan dana desa yang semakin meningkat. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Maharani dan Susanto (2021) yang menyatakan sistem pengendalian intern dapat memediasi hubungan kompetensi aparatur pemerintahan desa dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

SIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan bukti empiris tentang bagaimana pengaruh kompetensi aparatur pemerintahan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel *intervening* pada desa di Kecamatan Sungai Selan. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 83 responden data yang dapat diolah. Penelitian ini menemukan hasil bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi secara positif signifikan oleh kompetensi aparatur pemerintahan desa. Sedangkan sistem pengendalian intern dapat memediasi hubungan kompetensi aparatur pemerintahan desa dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 3(1).
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–

64. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>

- Ghozali, I. (2021). *Structural Equation Modeling dengan Metode Alternatif Partial Least Squares (PLS)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indraswari, N. E., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(4).
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2). <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199>
- Maharani, G., & Susanto, B. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel *Intervening* (Studi Empiris pada Desa di Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang). *Borobudur Accounting Review*, 1(2), 210–222. <https://doi.org/10.31603/bacr.6396>
- Ningsih, W., Indra Arza, F., & Fitria Sari, V. (2020). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(4), 3517–3532. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i4.300>
- Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2021 (2021).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (2023).
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (2013).
- Purba, S., Saragih, R., & Sembiring, T. M. B. (2022). Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 122–129. <https://doi.org/10.54259/akua.v1i1.140>
- Raharjo, M. M. (2020). *Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa*. Sinar Grafika Offset.
- Rismawati, T. (2019). *Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi*

Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Bandongan).